

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERIAN PERMAKINAN LANJUT USIA  
KELUARGA TUNGGAL DAN DISABILITAS TUNGGAL BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN  
2021 TENTANG ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL  
(Studi Kasus di Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan)**

Ilham Ramadhani Subali<sup>1</sup>, Hambali<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Yudhartha Pasuruan

[1ilhamramadhanisubali@gmail.com](mailto:ilhamramadhanisubali@gmail.com), [2Hambali@yudhartha.ac.id](mailto:Hambali@yudhartha.ac.id)

**ABSTRACT**

*This study is a qualitative case study that analyzes the implementation of the Food Assistance Program for the Elderly and Single Persons with Disabilities in Gondangwetan District. Using George Edwards III's implementation theory as a framework, the research aims to identify both the supporting and inhibiting factors influencing the program's success. The findings indicate that, at the operational level, the program is implemented quite effectively due to the high commitment of field implementers and the availability of sufficient budgetary resources, thus increasing beneficiary satisfaction. Nevertheless, the study also reveals fundamental problems within the bureaucratic structure, particularly concerning the validity of the Integrated Social Welfare Data (DTKS), which serves as the basis for program targeting. The low accuracy of this data stems from data updating procedures that are neither integrated nor efficient. This systemic data inaccuracy poses a major obstacle that may reduce the overall effectiveness of the program, even though its benefits are still tangibly felt by beneficiaries on the ground. Therefore, improvements toward a more accurate, integrated, and sustainable data management system are crucial to ensure precise aid distribution and to support the long-term sustainability of the food assistance program.*

*Keywords: Food Assistance Program, Elderly, Disabilities, Policy Implementation*

**ABSTRAK**

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang menganalisis implementasi Program Permakinan bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Tunggal di Kecamatan Gondangwetan. Dengan menggunakan kerangka teori implementasi George Edwards III, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan program tersebut. Temuan menunjukkan bahwa di tingkat operasional, pelaksanaan program berjalan cukup efektif berkat tingginya komitmen para pelaksana lapangan serta dukungan sumber daya anggaran yang memadai, sehingga mampu meningkatkan kepuasan para penerima manfaat. Namun demikian, penelitian juga menemukan permasalahan mendasar pada aspek struktur birokrasi, khususnya terkait validitas Data Terpadu Kesejahteraan

Sosial (DTKS) yang menjadi basis penentuan sasaran program. Rendahnya akurasi data ini disebabkan oleh prosedur pembaruan data yang belum terintegrasi dan masih bersifat tidak efisien. Ketidakakuratan data DTKS tersebut menimbulkan hambatan sistemik yang berpotensi mengurangi efektivitas program secara keseluruhan, meskipun manfaatnya tetap dirasakan secara nyata oleh penerima di lapangan. Oleh karena itu, perbaikan sistem pendataan yang lebih akurat, terpadu, dan berkelanjutan menjadi krusial guna memastikan tepatnya penyaluran bantuan serta mendukung keberlanjutan program permakanan di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Program Permakanan; Lanjut Usia; Disabilitas; Implementasi Kebijakan

**Catatan :** Nomor HP tidak akan dicantumkan, namun sebagai fast respon apabila perbaikan dan keputusan penerimaan jurnal sudah ada.

### **A. Pendahuluan**

Pembangunan berkelanjutan telah membawa konsekuensi positif berupa peningkatan jumlah serta proporsi penduduk lanjut usia (lansia). Berbagai kemajuan di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan kualitas hidup, serta meningkatnya taraf sosial ekonomi, turut berkontribusi pada naiknya angka harapan hidup dan menurunnya tingkat kematian. Data Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan bahwa sejak tahun 2021 Indonesia memasuki fase struktur penduduk tua (ageing population), di mana sekitar satu dari sepuluh penduduk adalah lansia. Fenomena ini sebenarnya dapat menjadi bonus demografi kedua apabila kelompok lansia masih

produktif dan mampu berkontribusi pada pembangunan nasional. Namun demikian, apabila kelompok ini tidak lagi produktif, maka keberadaannya berpotensi menjadi tantangan baru karena tergolong penduduk rentan.

Di samping itu, peningkatan jumlah penduduk penyandang disabilitas juga menjadi persoalan demografis yang perlu mendapat perhatian serius. BPS (2021) mencatat bahwa jumlah penduduk dengan disabilitas terus mengalami pertumbuhan, yang jika dikaitkan dengan fenomena penuaan penduduk, menggambarkan tantangan multidimensi dalam penyediaan layanan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Hal ini menuntut pemerintah untuk melakukan peningkatan kesejahteraan

masyarakat, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun perekonomian, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menegaskan bahwa kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Tugas besar tersebut menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berwenang dalam penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana untuk membantu presiden dalam meningkatkan taraf kesejahteraan sosial. Pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial di tingkat daerah melibatkan koordinasi erat dengan Dinas Sosial di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar program dapat terlaksana dan tersalurkan dengan baik (Cucun Lestiani, 2025). Beberapa program strategis yang telah dijalankan oleh Kementerian

Sosial antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Program Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), termasuk di dalamnya Program Permakanan untuk lansia keluarga tunggal dan penyandang disabilitas tunggal.

Program Permakanan ini diatur melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, dengan tujuan mewujudkan keberfungsian sosial individu, keluarga, dan komunitas dalam memenuhi kebutuhan dasar, melaksanakan peran sosial, serta mengatasi masalah kehidupan. Salah satu daerah yang menjadi fokus dalam implementasi Program Permakanan adalah Kecamatan Gondangwetan di Kabupaten Pasuruan, yang juga berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 56/4/HK.01/8/2022 tentang pedoman pelaksanaan pemberian permakanan bagi lanjut usia keluarga tunggal dan penyandang disabilitas tunggal. Namun, dalam pelaksanaan program tersebut di Kecamatan

Gondangwetan masih ditemukan beberapa hambatan yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor pendukung serta faktor penghambat dalam implementasi program pemberian permakanaan bagi lanjut usia keluarga tunggal dan penyandang disabilitas tunggal di Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, agar dapat memberikan masukan strategis untuk peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial di masa mendatang.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus lapangan di Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang implementasi Program Permakanan bagi lanjut usia keluarga tunggal dan penyandang disabilitas tunggal. Fokus penelitian mencakup pelaksanaan program serta faktor pendukung dan penghambatnya, dianalisis menggunakan teori implementasi George Edwards III yang menekankan komunikasi,

sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci, observasi partisipatif, serta telaah dokumentasi dan catatan arsip, termasuk regulasi, laporan program, dan data penerima manfaat. Teknik analisis data dilakukan secara tematik eksplanatori dengan tahap penyusunan deskripsi kasus, pengelompokan pola berdasar teori, eksplorasi bukti, dan penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Implementasi Program Berdasarkan Teori Edwards III**

Analisis implementasi Program Bantuan Permakanan di Kecamatan Gondangwetan dilakukan dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang menekankan empat indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

### **Komunikasi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jalur komunikasi program diatur secara vertikal, dimulai

dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kabupaten, Camat, hingga ke pendamping sosial dan kelompok masyarakat (Pokmas). Berbagai media komunikasi digunakan, antara lain surat resmi, rapat koordinasi, grup WhatsApp, dan aplikasi digital SIKSMA untuk pelaporan harian.

Koordinasi antar pelaksana terjalin secara intensif melalui grup WhatsApp, yang dinilai lebih efisien oleh para pendamping sosial. Meskipun demikian, terdapat hambatan komunikasi berupa prosedur pelaporan kematian penerima manfaat yang memerlukan waktu cukup panjang hingga tiga hari, akibat proses administratif yang kaku dan berjenjang.

Di samping itu, hambatan teknologi juga teridentifikasi dari ketidakstabilan aplikasi SIKSMA, yang beberapa kali mengalami error. Akibatnya, pelaporan terpaksa dilakukan secara manual menggunakan geo-tagging foto yang dikirim melalui WhatsApp. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya keandalan sarana komunikasi digital yang tersedia.

### **Sumber Daya**

Sumber daya yang mendukung program mencakup aspek anggaran, tenaga kerja, serta sarana fasilitas. Indeks bantuan yang ditetapkan sebesar Rp30.000 per orang per hari untuk konsumsi dua kali sehari, ditambah biaya pengiriman dan biaya operasional Pokmas. Temuan menunjukkan bahwa alokasi ini dinilai cukup memadai, dan proses pencairan berjalan lancar melalui kantor pos setiap bulan.

Dari sisi sumber daya manusia, pelaksana di lapangan seperti TKSK, pendamping sosial, dan anggota Pokmas dinilai telah menjalankan tugas sesuai prosedur. Namun, kendala tetap muncul pada aspek teknologi akibat aplikasi SIKSMA yang tidak stabil.

### **Disposisi (Sikap Pelaksana)**

Komitmen dan tanggung jawab pelaksana tergolong tinggi, tercermin dari upaya mereka mendistribusikan bantuan meskipun menghadapi tantangan cuaca dan infrastruktur. Petugas pengantar makanan (kurir) dan pendamping sosial berupaya mempertahankan kualitas layanan, meskipun terkadang terdapat keterlambatan pengiriman.

Kendati monitoring dan pengawasan diklaim dilakukan

rutin oleh pendamping sosial, muncul masalah inclusion error, di mana penerima manfaat yang sebenarnya sudah mampu secara ekonomi tetap tercatat di data DTKS. Hal ini disebabkan frekuensi verifikasi ulang yang hanya dilakukan satu tahun sekali, sementara kondisi ekonomi warga bersifat dinamis.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi program sangat hierarkis dengan pembagian peran yang jelas. Namun, kelemahan terjadi pada fungsi birokrasi terkait pemutakhiran data penerima manfaat. Prosedur pergantian data penerima bantuan memerlukan verifikasi berjenjang, yang terkadang terkendala ketika data DTKS tidak mutakhir.

Proses pelaporan kematian warga masih bersifat reaktif, bergantung pada laporan manual keluarga ke perangkat desa, dan belum terintegrasi otomatis antara sistem kependudukan (Dukcapil) dan sistem bantuan sosial (Kemensos via SIKS-NG). Akibatnya, terdapat potensi data tidak akurat yang menghambat penyaluran bantuan tepat sasaran.

## **PERSEPSI DAN KEPUASAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT**

### **Kepuasan Terhadap Proses Penyaluran**

Sebagian besar KPM merasa puas dengan proses penyaluran bantuan yang tepat waktu dan sesuai prosedur. Keterlambatan pengiriman sesekali terjadi, tetapi KPM cenderung memaklumi hal tersebut, bahkan menunjukkan empati terhadap kondisi kurir yang menghadapi cuaca buruk atau kendala akses jalan.

### **Persepsi terhadap Petugas Penyalur**

Interaksi antara KPM dan petugas dinilai sangat baik. KPM merasa dihargai, dapat menyampaikan keluhan terkait menu makanan, dan memperoleh respon cepat melalui diskusi dengan ahli gizi. Hubungan positif ini menciptakan layanan berbasis klien (client-centered) yang humanis dan responsif.

### **Dampak Program Terhadap Kesejahteraan**

Bantuan ini diakui oleh KPM sebagai penopang vital kebutuhan pangan sehari-hari,

terutama bagi mereka yang sebelumnya sangat bergantung pada belas kasih tetangga. Program terbukti memberikan manfaat nyata dan signifikan terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

#### **Faktor Pendukung Implementasi**

Berdasarkan temuan lapangan, beberapa faktor pendukung keberhasilan program antara lain:

1. **Komitmen tinggi pelaksana di lapangan** yang tetap mendistribusikan bantuan meski menghadapi tantangan.
2. **Anggaran yang memadai** dan pencairan dana yang berjalan lancar.
3. **Koordinasi informal yang efektif**, terutama melalui grup WhatsApp.
4. **Kepuasan KPM** yang tinggi terhadap bantuan dan kualitas interaksi petugas.

#### **Faktor Penghambat Implementasi**

Adapun faktor penghambat yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. **Kelemahan sistem data DTKS** yang tidak mutakhir dan rawan inclusion error.
2. **Fragmentasi sistem administrasi** antara Dukcapil dan Kemensos, yang menimbulkan proses pembaruan data bersifat reaktif.
3. **Prosedur birokrasi yang kaku** dalam pelaporan kematian penerima bantuan.

4. **Ketidakstabilan teknologi** (aplikasi SIKSMA) yang kerap mengalami gangguan.
5. **Faktor eksternal** seperti cuaca ekstrem atau penutupan jalan, yang memengaruhi kelancaran distribusi.

#### **D. Kesimpulan**

Dengan mempertimbangkan seluruh temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Bantuan Permakanan di Kecamatan Gondangwetan telah berjalan relatif efektif dalam menjangkau kelompok sasaran dan memenuhi kebutuhan pangan harian mereka, tercermin dari tingginya tingkat kepuasan dan dampak positif yang dirasakan oleh keluarga penerima manfaat. Meskipun demikian, program ini masih menghadapi sejumlah hambatan signifikan, terutama pada aspek akurasi dan pembaruan data DTKS, prosedur birokrasi yang kaku, serta kendala teknologi yang belum stabil. Disposisi pelaksana lapangan yang proaktif dan adanya dukungan anggaran memadai menjadi faktor penguat program, tetapi fragmentasi sistem administrasi dan proses pembaruan data yang bersifat reaktif menunjukkan perlunya perbaikan struktural dan integrasi digital

antarinstansi secara menyeluruh. Dengan demikian, agar manfaat program ini dapat menjangkau penerima yang benar-benar berhak secara berkelanjutan dan berkeadilan, diperlukan langkah-langkah inovasi kebijakan berbasis teknologi, penyederhanaan prosedur birokrasi, serta peningkatan kapasitas monitoring dan verifikasi data yang lebih dinamis dan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mustamir, Hendrayadi, A., & I. H. (2023). *Teori administrasi publik: Pengantar*. In M. E. Diana Purnama Sari (Ed.), *Administrasi Negara Publik*. PT Global Eksekutif Teknologi. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=vPsAEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=kebijakan+publik&ots=7flw0Mdhz2&sig=tqEnZEmO8ftIL4Tux6m4OWTOat8>
- A. R. S. dkk. (2022). *Kebijakan publik: Teori, formulasi dan aplikasi* (A. Y. M.Pd., Ed.). PT Global Eksekutif Teknologi.
- Chazali H. Situmorang. (2016). *Kebijakan publik (teori, analisis, implementasi dan evaluasi kebijakan)* (Vol. 11, Issue 1). Institute Social Security Development. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial*. Sekretariat Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/217211/permensos-no-7-tahun-2021>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2013). *Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu*.
- Lestiani, C. (2025). Implementasi program permakanan lanjut usia (lansia) oleh Kementerian Sosial melalui kelompok masyarakat (Pokmas) di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.
- Nikmah, S., & Rahaju, T. (2021). Evaluasi pelaksanaan program pemberian permakanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Surabaya. *Publika*, 9(3), 195–210. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p195-210>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Potret penyandang disabilitas di Indonesia* (p. 152).
- Rahmadana, M. F., Mawati, A. T., Siagian, N., Perangin-angin, M. A., Refelino, J., Siagian, V., Nugraha, N. A., Manullang, S. O., Silalahi, M., Yendrianof, D., Sari, A. P., Supriadi, M. N., Sari, M. H. N., Nurmaliita, & Bahri, S. (2020).

- Pelayanan publik* (J. Simarmata, Ed.). Yayasan Kita Menulis. [sorong.ac.id/index.php/jn/article/view/2586/1479](http://sorong.ac.id/index.php/jn/article/view/2586/1479)
- Sitna Hajar Malawat. (2022). *Pengantar administrasi publik* (P. Antoni Pardede, Ed.). Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2016). *Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 168/4/HK.01/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal Tahun 2025*.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). *Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 56/4/HK.01/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal dan Penyandang Disabilitas Tunggal*.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2024). *Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 182/4/HK.01/12/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas*.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik penduduk lanjut usia 2024* (p. 316).
- Tiara Fernanda, L. A. (2023). Implementasi program bantuan sosial pemberian makanan gratis bagi warga miskin di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 31–34. <https://ejournal.um->
- Tri Yuniningsih. (2017). *Etika administrasi publik*. Program Studi Doktor Administrasi Publik Press.
- Republik Indonesia. (1998). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*.
- Yin, R. K. (2014). *Case study research design and methods* (V. Knight, Ed.). SAGE Publications.